

Pengembangan *Smart Village* Sebagai Upaya Menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Masa Pandemi Covid-19

¹Hikmah Nuraini, ²Endang Larasati, ³Sri Suwitri, ⁴Hari Susanta Nugraha

¹Universitas Jenderal Soedirman

Jl. Profesor DR. HR Boenyamin No.708, Dukuhbandong, Grendeng, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia

^{2,3,4}Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Sudarto No.13, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Email: ¹ms.hikmahnuraini@gmail.com, ²larasati57@ymail.com, ³sri_suwitri@yahoo.co.id, ⁴harisusanta.nugraha@gmail.com

Tersedia Online di

<http://www.jurnal.unublitar.ac.id/index.php/briliant>

Sejarah Artikel

Diterima pada Agustus 2021
Disetujui pada November 2021
Dipublikasikan pada November 2021
Hal. 862-873

Kata Kunci:

Pengembangan, Smart Village, BUMDes

DOI:

<http://dx.doi.org/10.28926/briliant.v6i4.777>

Abstrak: *Smart Village* merupakan alternatif dalam pembangunan desa karena menerapkan konsep teknologi tepat guna, terutama dalam meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan menciptakan masyarakat yang melek teknologi. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu melihat bagaimana konsep *smart village* dalam mengembangkan BUMDes di masa Pandemi Covid-19 dengan studi kasus di BUMDes Tirta Mandiri Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Data diperoleh melalui teknik dokumentasi dan observasi. Analisis data menggunakan model interaktif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dari penelitian diketahui bahwa keberhasilan konsep *smart village* dapat dilihat dalam unsur *smart government*, *smart community* dan *smart economy*.

PENDAHULUAN

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan adalah salah satu dari sembilan program pemerintahan. Program tersebut bertujuan untuk menunjukkan prioritas pembangunan dalam melakukan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam perekonomian. Kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran dan desa adalah suatu terobosan besar karena saat ini terdapat 83.813 desa di seluruh Indonesia dengan 39.091 desa masih berstatus tertinggal dan 17.268 desa dengan status sangat tertinggal (BPS 2020). Jadi, dapat dikatakan dari segi kewilayahan Indonesia adalah suatu negara desa sehingga membangun Indonesia berarti membangun desa sebagai ujung tombak pembangunan.

Desa sebagai bagian dari negara sudah seharusnya mulai menerapkan teknologi informasi, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan

pengelolaan kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya bahkan juga dalam bidang pembangunan desa (Mahardhani 2014). Pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu indikator dalam percepatan pembangunan desa. Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat diharapkan akan memberikan perubahan-perubahan mendasar, terutama peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah memberikan dampak terhadap perubahan yang disebut oleh Castell sebagai ‘*knowledge economy*’ dan ‘*network societies*’ (Castells 1996).

Melihat peran penting desa dalam memajukan pembangunan di Indonesia maka penerapan dan pemanfaatan teknologi dan informasi di pedesaan wajib dikembangkan. Pengembangan wilayah pedesaan melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat dilakukan dengan konsep *smart village* atau desa pintar. 'Desa pintar' adalah model di mana, akses energi bertindak sebagai katalisator untuk mengembangkan dan meningkatkan berbagai hasil pembangunan. Jika dikelola dengan benar, teknologi akan memberikan hasil secara cepat pada peningkatan kesehatan, gizi, pendidikan, dan ketahanan ekonomi. Dengan demikian, penduduk desa dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan banyak manfaat kehidupan perkotaan sambil mempertahankan aspek kehidupan pedesaan yang bernilai, dan memastikan keseimbangan pembangunan di tingkat nasional (Holmes and Thomas 2015).

Membangun desa pintar dapat dimulai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk internal desa yang diantaranya berfungsi untuk mengatur administrasi desa dengan menggunakan berbagai program aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, selanjutnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk eksternal desa yang biasanya berhubungan dengan pembangunan portal atau *marketplace*. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam internal dan eksternal pemerintahan desa ini menjadi kunci utama keberhasilan suatu desa menjadi desa yang smart atau pintar. Secara umum suatu desa dapat dikatakan sebagai desa cerdas apabila desa tersebut secara inovatif menggunakan teknologi informasi untuk mencapai peningkatan kualitas hidup, efisiensi dan daya saing dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Ramesh 2018). *Smart Village* adalah konsep yang dikembangkan pemerintah dalam mengembangkan kapasitas pemerintah desa dan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mengelola berbagai sumber daya lokal untuk mengembangkan ekonomi desa serta mensejahterakan warganya.

Smart village merupakan sebuah pengembangan dari konsep *smart city*. yang diaplikasikan pada wilayah pedesaan agar desa dapat menyelesaikan permasalahannya dengan cerdas. *Smart village* digagas untuk memanfaatkan teknologi informasi bagi masyarakat pedesaan sebagai upaya untuk mengedukasi masyarakat lokal tentang pentingnya teknologi informasi dan komunikasi di era digital. Tidak hanya berfokus pada kecanggihan teknologi di suatu desa saja *smart village* juga diharapkan dapat mengubah kondisi masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera, menumbuhkan kesadaran di masyarakat akan pentingnya sebuah inovasi dalam usaha kecil yang berpotensi menciptakan kewirausahaan, meningkatkan partisipasi masyarakat di desa (Laksono, Chawa, and Yuliati 2020) serta meningkatkan kualitas pelayanan di desa.

Karakteristik wilayah desa, budaya, masyarakat yang homogen, menjadi suatu alasan bahwa pengembangan wilayah desa tidak dapat disamakan dengan lingkup kota dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Perlu adanya suatu konstruksi konseptual yang mendasar pada karakteristik wilayah desa dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga desa mampu menciptakan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan dengan mendasar pada nilai, karakter dan norma yang dimiliki desa (Herdiana 2019).

Konsep *smart village* juga harus didukung oleh beberapa komponen agar penerapannya memberikan dampak positif dan maksimal. Pemerintah, masyarakat, dan lingkungan perdesaan merupakan elemen pembentuk *smart village* yang memiliki peran dan fungsi berbeda. Ketiga elemen tersebut menjadi suatu kesatuan yang saling memengaruhi dan membentuk unsur-unsur *smart village* yaitu *smart government*, *smart community* dan *smart economy*. *Smart Government* merupakan suatu pengembangan dari *e-government* yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi yang digunakan oleh pemerintah untuk kinerja yang lebih baik. *Smart government* dapat diukur dengan melihat: 1). Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan; 2). Ketersediaan layanan publik dan sosial dan 3). Transparansi tata kelola.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dipahami sebagai kemampuan pemerintah dalam melakukan pengelolaan dan koordinasi kepada masyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan pelibatan masyarakat dalam forum pengambilan keputusan. Ketersediaan layanan publik dan sosial diartikan sebagai ketersediaan dan kemudahan dalam hal akses pelayanan publik. Selain kemudahan dalam pelayanan publik juga terdapat kemudahan dalam penyampaian pengaduan masyarakat yang tersedia melalui online. Transparansi tata kelola menjabarkan terkait jenis media yang di sediakan kepada masyarakat untuk mengakses informasi dan mekanisme keterbukaan program perencanaan. Secara umum *smart government* identik dengan penerapan *e-government* atau pengelolaan pemerintah berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi dalam sistem pemerintahannya guna mewujudkan transparansi pemerintahan desa, pelayanan desa berbasis elektronik dan pemanfaatan sosial media dalam menyampaikan informasi kepada publik dan mewadahi aspirasi masyarakat.

Smart Community merupakan sebuah konsep mengenai pengembangan sebuah kawasan yang menggabungkan sistem dan infrastruktur teknologi yang berbasis *mobile internet* di era masyarakat modern. Seiring dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan terhadap penyediaan fasilitas teknologi ramah lingkungan menjadi sebuah keharusan. Masyarakat memiliki peran penting dalam konteks *smart village* karena masyarakat bukan hanya subyek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa tapi juga objek yang memiliki kehendak dan tujuan untuk menentukan arah kehidupannya. Atas dasar itulah, maka masyarakat perlu memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik mengenai kedudukan dan perannya di desa. Masyarakat harus menjadi bagian yang aktif dalam proses pengembangan desa sehingga akan menjadi pihak yang menerima manfaat.

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi harus disikapi oleh masyarakat sebagai sebuah peluang untuk mengoptimalkan peran serta dan kontribusinya dalam pengembangan desa. Teknologi informasi hadir sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan penguatan kapasitas masyarakat

yang dituntut berkontribusi dalam pengembangan desa. Implikasinya, masyarakat harus memiliki sikap terbuka dan mengadopsi teknologi informasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari baik dalam konteks pribadi maupun dalam konteks sosial dan pemerintahan desa. Dengan begitu masyarakat tidak hanya akan diuntungkan dari adanya teknologi informasi, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas masyarakat akan menerima keuntungan dari adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam konteks sosial dan pemerintahan di desa.

Smart economy merupakan suatu konsep pengembangan ekonomi kreatif, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan daya serap tenaga kerja di sektor unggulan, dan penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, ketahanan pangan dan gizi, dan penguatan budaya yang berbasis pada sumber daya lokal. *Smart economy* ditandai dengan semakin tingginya persaingan dan munculnya inovasi-inovasi baru dalam kegiatan ekonomi masyarakat (Giffinger and Haindl 2007). Berbagai kegiatan ekonomi masyarakat diharapkan dapat dicapai dengan penguasaan terhadap teknologi informasi dan juga teknologi internet sehingga akan lebih *simple* (lebih mudah), *cheaper* (lebih murah), *accessible* (lebih terjangkau), dan *faster* (lebih cepat).

Smart Economy dibangun atas empat aspek, yaitu spirit inovasi, kewirausahaan, fleksibilitas pasar tenaga kerja, dan konektivitas internasional (Bobek 2015). Dengan adanya aspek-aspek tersebut maka akan ada promosi terhadap berbagai potensi yang ada, memunculkan inovasi dalam usaha sehingga akan meningkatkan daya saing (*competitives*). Konektivitas yang ada diharapkan akan membuat suatu jaringan usaha sehingga dapat menjadi tempat untuk mempertemukan penawaran dan permintaan (*Supply and Demand*).

Dalam rangka penguatan ekonomi lokal pedesaan konsep smart ekonomi lebih sesuai diterapkan pada BUMDes. BUMDes sebagai badan usaha yang didirikan di desa yang merupakan milik bersama antara pemerintah desa dan masyarakat (bersifat komunal), sehingga lebih mencerminkan unsur kebersamaan dalam menjalankan usaha, dimana kehidupan masyarakat di pedesaan umumnya memiliki kultur, gotong royong, persaudaraan, rasa sosial yang tinggi, dan tidak sekedar mencari keuntungan semata. Oleh karenanya, BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa dapat diartikan sebagai lembaga ekonomi alternatif untuk meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan. Idealnya, tujuan BUMDes adalah untuk mencari keuntungan (*profit oriented*) dalam menggerakkan perekonomian desa melalui pemanfaatan potensi lokal yang ada. Adanya kegiatan ekonomi dalam BUMDes dapat menjadi bagian dari usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional (Ridlwani 2015).

Program *smart village* dinilai dapat memberikan kemudahan dalam integrasi data sehingga dapat diterapkan sebagai alternatif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan pengelolaan perekonomian desa melalui BUMDes. Pengelolaan BUMDes yang berbasis pada program *smart village* akan mewujudkan suatu desa cerdas yang berbasis digital, dengan masyarakat desa yang cerdas. Masyarakat yang cerdas dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi akan menghasilkan ekonomi yang cerdas dengan berbagai inovasi dan kreasi sehingga meningkatkan produktivitas.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, karena lebih mampu menjelaskan, memberikan pengertian serta menggali penyebab serta alasan yang mendasarinya. Penelitian kualitatif dianggap mampu untuk mengungkapkan dan memahami berbagai fenomena di lapangan (Strauss and Corbin 1998).

Penelitian ini melihat bagaimana konsep *smart village* dalam mengembangkan BUMDes di masa Pandemi Covid-19 dengan studi kasus di BUMDes Tirta Mandiri Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Data diperoleh melalui teknik dokumentasi yaitu melalui koran, baik koran *online* atau koran cetak, yang mengulas tentang keberhasilan-keberhasilan desa yang mengembangkan *smart village*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data yang diperoleh dari observasi, observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang paling mendasar dalam penelitian dalam mengambil tindakan dan menafsirkan suatu peristiwa dan implikasinya. Observasi dilakukan di desa-desa yang sukses dalam usaha dan manajemen BUMDes, seperti Desa Cibodas melalui BUMDes Karya Mandiri, Desa Panggunharjo melalui BUMDes Panggung Lestari, serta Desa Bringinan melalui BUMDes Margo Mulyo (Luthfiani 2019; Sudrajat, Syakdiah, and Suwarjo 2020; Pratiwi and Novianty 2020). Selanjutnya, analisis data menggunakan model interaktif (Miles and Huberman 1992) yang terdiri dari tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Smart Governance

Pembangunan desa menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah terjadi reposisi kewenangan penyelenggaraan pembangunan dari pemerintah daerah ke pemerintah desa. Dalam proses pembangunan desa, pemanfaatan teknologi informasi menjadi penting dan menjadi bagian dalam mendorong keberhasilan pembangunan desa. Teknologi informasi menjadi alat selain untuk mempermudah proses penyusunan dan pelaksanaan pembangunan desa, juga menjadi media untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan desa. Teknologi informasi mempertemukan berbagai kepentingan untuk bisa dirumuskan secara bersama-sama menjadi sebuah kebijakan pembangunan desa.

Smart Government merupakan suatu pengembangan dari e-government yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi yang digunakan oleh pemerintah desa Ponggok dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pelayanan publik. Membangun desa dengan konsep *smart village* tidak hanya berfokus pada penerapan teknologi di suatu desa, tetapi ada hal yang lebih utama, yaitu lebih kepada bagaimana konsep ini mampu mengubah kondisi masyarakatnya menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera, menumbuhkan kesadaran di masyarakat akan pentingnya sebuah inovasi.

Berbagai usaha kecil yang berpotensi untuk menciptakan kewirausahaan, dan meningkatkan kualitas pelayanan di desa akan lebih mampu memberikan

kenyamanan dan kepuasan pada masyarakat. Selain itu, kunci dari suksesnya konsep smart village adalah dengan menambah pengetahuan masyarakat desa melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan. Dengan adanya smart village ini, peran pemerintah desa akan lebih dioptimalkan dengan tujuan agar dapat mengelola sumberdaya desanya secara efektif, efisien, dan sustainable.

Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten merupakan salah satu desa yang berkembang dengan pesat dan bertransformasi menjadi desa maju, dengan mengimplementasikan konsep smart village. Dalam upaya penerapan smart village, Desa Ponggok memulainya dengan tata kelola pemerintahan desa yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai langkah dalam memaksimalkan potensi desa dalam rangka memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat yang bermuara pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa (Silence 2021; Humas Jateng 2021; NURFAISAL 2019).

Pusat pelaksanaan smart village dilaksanakan di kantor desa atau balai desa, sehingga kantor desa atau balai desa akan terus didatangi masyarakat yang kemudian hal ini juga akan berdampak baik untuk hubungan antara warga desa dan pemerintah desa. Kantor desa atau balai desa diharapkan juga bisa berfungsi sebagai rumah kreatif warga atau dapat dikembangkan menjadi tempat citizen sourcing, yaitu tempat yang memfasilitasi masyarakat untuk memberikan ide atau inovasi yang dapat dikembangkan di desanya.

Berdasarkan hasil observasi saat ini desa Ponggok telah menggunakan kemajuan IT ini untuk mendukung pengembangan desa melalui aplikasi Desa Pintar. Aplikasi Desa Pintar milik Desa Ponggok memuat banyak hal seperti, informasi tentang peta desa, masyarakat, kebijakan pemerintah desa, berbagai program pembangunan, BUMDes, penggunaan dana desa dan informasi lainnya. Di dalam aplikasi Desa Pintar juga termasuk ada wisata, potensi desa, pelayanan publik dan semua bentuk informasi lain yang ada di desa. Semua disajikan dalam satu aplikasi. Selain menyajikan sejumlah informasi, aplikasi Desa Pintar juga berisi data-data yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan desa.

Smart Community

Smart community adalah sebuah konsep gagasan pengembangan sebuah kawasan yang menggabungkan sistem dan infrastruktur teknologi yang berbasis mobile internet dengan tujuan meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan di masyarakat. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi harus disikapi oleh masyarakat sebagai sebuah peluang untuk mengoptimalkan peran serta dan kontribusinya dalam pembangunan desa. Teknologi informasi hadir sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan penguatan kapasitas masyarakat yang dituntut berkontribusi dalam pengembangan desa. Implikasinya, masyarakat harus memiliki sikap terbuka dan mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Pembangunan desa yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebenarnya telah dikenalkan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Desa, Peta Digital Desa melalui Web Geografic Information System untuk memonitoring perkembangan desa. Adanya teknologi seperti yang disebutkan sebelumnya akan

sangat mendukung bagi pembangunan pedesaan. Sistem informasi desa online merupakan sarana untuk mempublikasikan informasi dan sebagai pusat informasi desa. Sistem informasi potensi desa akan menjadi basis data potensi sumber daya alam, sumber daya manusia yang akan mendukung produktivitas masyarakat (Nurdin and Rachmawati 2017). Website tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk menyebarluaskan data dan informasi yang berkaitan dengan potensi yang ada di desa. Oleh karena itu website ini dapat diakses oleh masyarakat atau pihak lain.

Pemerintah Desa Pongkok dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan pembangunan Desa selalu mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pembahasan musyawarah Desa, diantaranya yang dapat mewakili masyarakat adalah lembaga-lembaga masyarakat Desa Pongkok seperti Karang Taruna Putra Telaga, Kelompok Masyarakat Seni Musik, Kelompok Masyarakat Paguyuban Makam, dan Kelompok Sinoman. Kelompok-kelompok ini diharapkan mampu memperkenalkan atau menginformasikan kepada masyarakat Desa tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa dan mengenai keberadaan BUMDes Tirta Mandiri.

Proses diskusi dimulai dari bawah yakni dari RT-RT yang ada di Desa Pongkok, setelah itu RT membawa hasil diskusi yang telah dihasilkan bersama masyarakat untuk didiskusikan kepada RW-RW yang ada di Desa Pongkok, setelah itu dibawa ke dalam musyawarah desa, yang dihadiri oleh elemen lainnya seperti BPD, perwakilan masyarakat dan Pemerintah Desa. Jadi, informasi ini dapat diterima oleh Pemerintah Desa Pongkok. Apabila ada informasi mengenai perkembangan Desa atau masalah yang ada di Desa dapat langsung diberitahukan kepada Pemerintah Desa. Sistem ini diberi nama RT-RW NET jadi setiap RT-RW diberikan sambungan internet yang informasinya melalui e-mail Desa dan whatsapp Desa Pongkok.

Keberadaan RT-RW NET dan WhatsApp Desa membuat masyarakat desa paling tidak melek terhadap perkembangan teknologi sehingga masyarakat desa juga dapat menikmati manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi untuk berbagai aktivitas dan kebutuhan mereka. Pengetahuan mereka akan perkembangan teknologi dapat untuk mempromosikan berbagai produk yang mereka miliki atau juga untuk saling berdiskusi untuk pengembangan desa mereka.

Smart Economy

Smart Economy merupakan suatu konsep tata kelola dalam perekonomian yang berbasis pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Smart economy bertujuan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah terutama pedesaan agar dapat mengikuti tantangan di era disrupsi yang menuntut tingkat adaptasi yang sangat cepat. Era disrupsi ekonomi merupakan fenomena ketika masyarakat menggeser aktivitas-aktivitas ekonomi yang awalnya dilakukan di dunia nyata ke dunia maya (Lasmawan 2019).

Sasaran Smart Economy adalah untuk mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah. Aktivitas ekonomi yang ada harus bersifat adaptif yang mampu memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal yang ada. Untuk itu, diperlukan peningkatan financial literacy masyarakat melalui berbagai program

pengembangan ekonomi masyarakat. Sasaran tersebut diwujudkan dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu:

1. ekosistem industri
2. peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. ekosistem transaksi keuangan

Strategi yang diambil dalam smart economy ini menitikberatkan pada lingkungan industri yang kreatif dan sinergis, saling membutuhkan dan menguntungkan baik produksi, promosi, bahkan transaksi keuangan, dalam suasana yang kondusif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes beroperasi untuk memperoleh keuntungan (profit), secara ideal dalam menjalankan usahanya juga diwarnai oleh budaya lokal, yaitu falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom), seperti member base dan self help. Kondisi inilah yang menjadikan BUMDes sebagai suatu lembaga yang unik dimana usaha desa merupakan milik kolektif antara pemerintah desa dengan masyarakat secara bersama-sama.

BUMDes pada teori ekonomi ataupun administrasi publik dikenal dengan istilah public and privat partnership, maka BUMDes merupakan public and community partnership (Eko 2014). Kenyataan ini mengandung artian bahwa dalam struktur desa, penyelenggaraan urusan pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari unsur masyarakat yang dasar dan orientasi kebijakan pemerintah desa yang dilaksanakan sepenuhnya ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat.

Pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri merupakan wujud dari inovasi baru sebagai implementasi dari smart economy yang dicetuskan oleh Pemerintah Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Inovasi dibangunnya BUMDes bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan wahana wisata dan unit-unit usaha yang telah dikelola oleh BUMDes. Hal ini sesuai tujuan BUMDes Tirta Mandiri yaitu:

1. Mengembangkan aset yang ada untuk terus dapat dimaksimalkan sebagai sumber pendapatan desa yang berkelanjutan.
2. Mampu menganalisa potensi, peluang, dan tantangan untuk menyusun rencana usaha yang mengikuti trend pasar atau menciptakan pasar baru.
3. Pengelolaan keuangan yang sehat berikut dngan strategi perencanaan investasi yang tepat dan tingkat resiko yang rendah
4. Peningkatan kriteria dan kapasitas SDM BUMDes untuk dapat tercapainya BUMDes yang handal dan terpercaya.
5. Strategi promosi produk barang dan jasa efektif untuk menarik/ menumbuhkan kepercayaan investor untuk penanaman modal di BUMDes dengan pembagian hasil yang rasional.

BUMDes Ponggok Tirta Mandiri dirintis sebagai usaha perdagangan pakan ikan dan pinjaman modal bagi masyarakat. Kemudian, dikembangkan ke sektor pariwisata Umbul Ponggok sebagai wahana rekreasi. Dengan semangat dan tekad yang kuat, BUMDes ini terus mengembangkan sayap dengan membangun unit-unit usaha baru. Kini BUMDes Tirta Mandiri telah memiliki 11 unit usaha. Enam unit

usaha diantaranya sudah berbentuk PT yang menyumbang pendapatan cukup besar untuk Desa Ponggok.

BUMDes Tirta Mandiri bergerak dengan memanfaatkan aset-aset desa berupa sumber mata air, tanah yang subur, dan kearifan lokal. Aset yang dimiliki oleh pemerintah Desa Ponggok tidak itu saja melainkan ada beberapa aset Desa yang dikelola oleh BUMDes yaitu : pariwisata (Umbul Ponggok), pengelolaan air bersih (PAB), penyewaan kolam ikan, penyewaan kios kuliner dan toko desa, persewaan mobil, pinjaman bergulir bagi warga, pinjaman modal untuk warga ekonomi menengah, dan menjual saham kepada masyarakat.

Penjualan saham ini merupakan bentuk dari investasi yang dikelola oleh BUMDes yang kemudian ditawarkan kepada seluruh masyarakat Desa Ponggok, dan saham ini dapat dimiliki oleh setiap masyarakat Desa Ponggok mulai nominal pembelian saham Rp. 100.000,00 hingga saham besar sebesar Rp. 5.000.000,00 dan setiap satu keluarga atau satu Kartu Keluarga (KK) hanya diperbolehkan membeli satu saham saja sebagai bentuk keadilan agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Sifat dari BUMDes ini yaitu mengelola potensi dan aset desa dan mengembangkan perekonomian desa yang menguntungkan. Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program proyek pemerintahan dan pemerintah daerah.

Pengembangan ekonomi di desa Ponggok dilakukan dengan melakukan inovasi terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada dan bertindak out of the box dalam pengelolaannya. Selain itu, dalam pengelolaan BUMDes juga memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan promosi melalui platform media sosial. Satu hal yang selama ini kerap dilupakan pengurus BUMDes lain dalam mempromosikan potensi wisata yang dimilikinya, yaitu tidak menggunakan media sosial sebagai media promosi untuk menjangkau khalayak luas. Mengutip data Tomato Digital Indonesia, dari total 268 juta penduduk pada awal 2019, pengguna internet aktif sudah tembus 150 juta orang atau 56 persen populasi (Websindo 2019). Adapun 142,8 juta orang diketahui sebagai pengguna internet yang mengakses dari ponsel. Selanjutnya, terdapat sekitar 150 juta orang memiliki akun medsos, yang 130 juta orang mengakses medsos dari ponsel (Putra 2019). Dari data ini, dapat diambil kesimpulan promosi di medsos memegang peranan sangat penting bagi sebuah BUMDes ketika ingin mengenalkan lokasi wisata yang potensial kepada banyak orang.

Adanya pandemi COVID-19 membuat berbagai unit usaha di Ponggok mengalami penurunan pendapatan karena adanya pembatasan sosial berskala besar yang membuat semua tempat wisata dan warung makan dan pancangan tutup. Adanya pandemi COVID-19 telah membuat kebiasaan dan pola dalam masyarakat ikut berubah (Mahardhani 2020). Dalam menghadapi skema new normal sebagai dampak pandemi COVID-19 kegiatan di desa Ponggok termasuk Pengelolaan BUMDes akan kembali pada kegiatan di pedesaan kembali kepada sektor pertanian, sifat gotong-royong, dan menggiring masyarakat kembali pada kebiasaan memenuhi kebutuhan sehari-harinya secara mandiri. Desa Ponggok merupakan desa yang memiliki berbagai potensi pada bidang perairan. Dengan potensi tersebut, BUMDes Ponggok mampu menyumbang pendapatan bagi kas desa hingga

miliaran rupiah dengan menggerakkan usaha perikanan, fasilitas penyediaan air, dan pariwisata perairan. Sebagai BUMDes yang memanfaatkan potensi perairan, adanya pandemi COVID-19 tentu menuntut adanya inovasi bagi kelangsungan BUMDes Ponggok. Untuk menjaga kelangsungannya BUMDes Ponggok telah beradaptasi dengan beralih menjual cemilan olahan ikan nila. Hal ini dilakukan karena peluang untuk menjual ikan nila segar semakin kecil akibat kondisi pemancingan dan restoran yang masih tutup di masa pandemi ini.

Secara umum pengembangan teknologi informasi dan komunikasi akan sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi bagi masyarakat di pedesaan tanpa ada perbedaan dengan masyarakat perkotaan. Dengan berbagai inovasi yang mereka lakukan dengan teknologi yang ada mereka dapat menyampaikan dan menyebarkannya kepada masyarakat luas, secara tidak langsung ini merupakan promosi bagi hasil karya mereka. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang dikuasai oleh masyarakat diharapkan kegiatan ekonomi masyarakat akan lebih simple (lebih mudah), cheaper (lebih murah), accessible (lebih terjangkau), dan faster (lebih cepat) baik dalam pemasaran maupun perkembangannya.

KESIMPULAN

Smart village atau desa cerdas adalah suatu desa yang secara inovatif menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi dan daya saing dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. *Smart government*, *smart community* dan *smart economy* merupakan unsur-unsur yang memiliki peran penting dalam mewujudkan *smart village*. Ketiga unsur tersebut saling bersatu menjalin sinergi antara fungsi pemerintah desa sebagai motor penggerak melalui peningkatan kapasitas pemerintah desa yang berbasis teknologi untuk menggerakkan dan mengarahkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang cerdas dan melek teknologi. Terbentuknya *smart community* telah menciptakan peluang bagi masyarakat desa untuk mengoptimalkan peran serta dan kontribusinya dalam pembangunan desa sehingga mampu berkreasi dan berinovasi dalam memanfaatkan berbagai sumber daya dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam rangka untuk keberlanjutan *smart village* di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten adalah adanya kolaborasi antar aktor yang harus terus berlanjut dalam rangka untuk memberikan berbagai layanan terbaik untuk masyarakat, ke depan model kolaborasi *quadruple helix* harus dilakukan karena masukan dari akademisi dan bantuan dari pengusaha sangat memberikan andil dalam rangka menguatkan keberlangsungan *smart village* tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Bobek, Jasmina Mavrič and Vito. 2015. "Measuring Urban Development and City Performance." *Mavrič, Jasmina and Bobek, Vito*. <https://doi.org/DOI:10.5772/61063>.
- BPS. 2020. "Jumlah Kelurahan/Desa Menurut Provinsi 2020."

- Castells, Manuel. 1996. *The Rise of the Network Society*. Massachusetts: Blackwell Publishers Ltd.
- Eko, Yunanto Sutoro. 2014. "Membangun BUMDes Yang Mandiri Kokoh Dan Berkelanjutan." Yogyakarta.
- Giffinger, Rudolf, and Gudrun Haindl. 2007. "Smart Cities Ranking: An Effective Instrument for the Positioning of Cities?," 703–14.
- Herdiana, Dian. 2019. "Pengembangan Konsep Smart Village Bagi Desa-Desa Di Indonesia (Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages)." *JURNAL IPTEKKOM: Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi* 21 (1): 1. <https://doi.org/10.33164/iptekkom.21.1.2019.1-16>.
- Holmes, John, and Meredith Thomas. 2015. "Introducing the Smart Villages Concept." *The International Journal on Green Growth and Development* 2 (2): 151–54.
- Humas Jateng. 2021. "Keren, Desa Ponggok Yang Makin Canggih - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah." <https://jatengprov.go.id>. January 6, 2021. <https://jatengprov.go.id/publik/keren-desa-pongok-yang-makin-canggih/>.
- Laksono, Nurfi Fuadi;, Anif Fatma; Chawa, and Yayuk Yuliati. 2020. "Pengelolaan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Sawentar)." *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual* 5 (4): 865–78. <https://doi.org/10.28926/BRILIANT.V5I4.539>.
- Lasmawan, I Wayan. 2019. "ERA DISRUPSI DAN IMPLIKASINYA BAGI REPOSISI MAKNA DAN PRAKTEK PENDIDIKAN (KAJI PETIK DALAM PERSPEKTIF ELEKTIK SOSIAL ANALISIS)." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1 (1): 54–65. <https://doi.org/10.23887/JMPPPKN.V1I1.13>.
- Luthfiani, Nadia. 2019. "Berbagai Transformasi Positif Desa Bringinan Berkat Bantuan Dana Desa." <https://www.viva.co.id>. October 2019. <https://www.viva.co.id/kemendesa/1185446-berbagai-transformasi-positif-desa-bringin-an-berkat-bantuan-dana-desa>.
- Mahardhani, Ardhana Januar. 2014. *Strategi Pembangunan Desa*. Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press.
- . 2020. "Menjadi Warga Negara Yang Baik Pada Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kenormalan Baru." *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.24269/jpk.v5.n2.2020.pp65-76>.
- Miles, M, and A. M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Edited by Tjetjep Rohendi Rohadi. Terjemahan. Jakarta: UI Press.
- Nurdin, Muhammad, and R Rachmawati. 2017. *Pembanguna Desa Berbasis ITC*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM.
- NURFAISAL, MUHAMMAD DWI. 2019. "SMART VILLAGE ACCOUNTABILITY: STUDI KOMPARATIF PENGELOLAAN BUMDES TIRTA MANDIRI DESA PONGGOK KABUPATEN KLATEN DAN BUMDES GIRITAMA DESA DLINGO KABUPATEN BANTUL SEBAGAI INCOME GENERATING BAGI DESA TAHUN 2018." Yogyakarta: MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/30405>.
- Pratiwi, Monika Balqis, and Ira Novianty. 2020. "Strategi Bertahan Badan Usaha

- Milik Desa (BUMDes) Dalam Pandemi COVID-19 Pada Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.” *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* 11 (1): 1098–1104. <https://doi.org/10.35313/IRWNS.V11I1.2170>.
- Putra, Eric Purnama. 2019. “Kesuksesan Umbul Pongok Dan Peran Promosi Medsos,” 2019. <https://doi.org/https://writing-contest.bisnis.com/read/20191201/557/1176969/kesuksesan-umbul-pongok-dan-peran-promosi-medsos>.
- Ramesh, Boda. 2018. “Concept of Smart Village and It’s Impact on Rurbanization.” *International Journal of Trend in Scientific Research and Development* Volume-2 (Issue-3): 1948–50. <https://doi.org/10.31142/ijtsrd11123>.
- Ridlwan, Zulkarnain. 2015. “Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8 (3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>.
- Silence, Eerie. 2021. “Transformasi Desa Pongok, Dari Yang Termiskin Menjadi Desa Terkaya Di Klaten.” <https://Digstraksi.Com>. September 30, 2021. <https://digstraksi.com/transformasi-desa-pongok-dari-yang-termiskin-menjadi-desa-terkaya-di-klaten/>.
- Strauss, Anselm L, and Juliet M Corbin. 1998. *Basic of Qualitatif Research : Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. London: Sage Publication. Inc.
- Sudrajat, Dating, Syakdiah Syakdiah, and Suwarjo Suwarjo. 2020. “PERAN BUMDes PANGGUNG LESTARI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PANGGUNG HARJO, SEWON, BANTUL.” *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik (JMPKP)* 2 (2): 70–91. <https://doi.org/10.36085/JMPKP.V2I2.960>.
- Websindo. 2019. “Indonesia Digital 2019 .” <https://websindo.Com/Indonesia-Digital-2019-Tinjauan-Umum/>. January 1, 2019. <https://websindo.com/indonesia-digital-2019-tinjauan-umum/>.